

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI
KELURAHAN TALANG PUTRI KECAMATAN PLAJU KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai
Derajat Sarjana S-1 ilmu Sosiologi**



**Diajukan Oleh :
A. Karim Fikhi
07043102063**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2008/2009**

S
353.533 207
file
p
C-091287
2009

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI
KELURAHAN TALANG PUTRI KECAMATAN PLAJU KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai
Derajat Sarjana S-1 ilmu Sosiologi**



**Diajukan Oleh :
A. Karim Fikhi
07043102063**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2008/2009**

LEMBAR PENGESAHAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN
(P2KP) DI KELURAHAN TALANG PUTRI KECAMATAN PLAJU
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti
ujian skripsi dalam memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjan S-1 Sosiologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Inderalaya, Juli 2009**

Diajukan Oleh :


**A. KARIM FIKHI
07043102063**

Pembimbing I



Drs. Mulyanto, MA
NIP. 131 288 647

Pembimbing II



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 131 999 050

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)
DI KELURAHAN TALANG PUTRI KECAMATAN PLAJU KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal, 06 Agustus 2009**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Drs. Mulyanto, MA.

Ketua

Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si.

Anggota

Dra. Yusnaini, M.Si


Anggota


Yunindyawati, S.Sos., M.Si

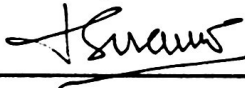
Anggota

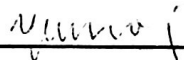
Drs. Tri Agus Susanto, M.Si


Anggota





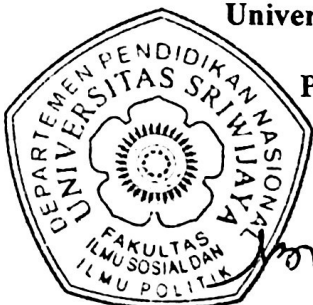







**Indralaya, Agustus 2009
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Plt Dekan,




Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA.
NIP. 130 686 230

MOTTO:

SEIALU OPTIMIS DAN BERFIKIR POSITIF DALAM
MENJALANKAN SETAP KEGIATAN, KARENA HAL
TERSEBUT DAPAT MEMOTIVASI DAN
MENJADIKAN KITA OPTIMIS DALAM
MENYELESAIKANNYA

ORANG YANG HEBAT ADALAH ORANG YANG
APABILA MENDAPAT UJIAN IA MAMPU UNTUK
JETAP TENAG DAN BERUSAHA UNTUK JETAP
TABAH. KARENA ITU SEMUA ADALAH JALAN
UNTUK MENBAWA KITA PADA KEDEWASAAN

Karya Ini Ku Persembahkan Untuk:

1. Mama Papaku
2. Nenek dan Kakakku
3. Adik-adikku
4. My Spirit Motivation
5. Keluarga Besaraku
6. Almamaterku
7. Teman-temanaku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya sebagai persyaratan menyelesaikan jenjang S1 Sosiologi. Tak lupa pula salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Besar Muhamad SAW, beserta pengikutnya sampai akhir zaman.

Penelitian ini berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang diharapkan hasil penelitian ini dapat wawasan baru dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat hambatan-hambatan, baik dari diri penulis sendiri, maupun yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dukungan, motivasi serta bantuan yang telah diberikan sangatlah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zulkifli Dahlan , M.Si, DEA selaku Plt. Dekan FISIP Unsri.
2. Drs. Gatot Budiarto, MS selaku PD 1 FISIP Unsri, Dra. Rogaiyah, M.Si selaku PD II FISIP Unsri, dan Dra. Retna Mahriyani, M.Si selaku PD III FISIP Unsri.
3. Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Diana Dewi Sartika S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi.
4. Drs. Sulaiman Mansyur LC selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberi masukan berkaitan dengan kegiatan akademis.

5. Pembimbing I Drs. Mulyanto, MA yang telah banyak memberikan waktu luang untuk menasehati dan memberikan arahan penelitian bagi penulis
6. Pembimbing II Dra. Dyah Hapsari, ENH di dalam kesibukannya sebagai dosen dan Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Unsri telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada saya.
8. Para karyawan yang telah banyak membantu saya selama kuliah.
9. Kedua orang tua saya, papa dan mama yang telah banyak memberi masukan dan spirit serta doanya untuk kesuksesan dalam setiap kegiatan yang telah saya lakukan, adik-adiku tercinta, Puput, Dian dan Budi (Rajin-rajin kuliah ya biar cepet selesai), Nenek Djauhari terima kasih untuk doa dan nasehatnya.
10. Keluarga Besarku Wa' Ali syahbana dan Wa' Bainah, Papa Le' dan Mama Le', Wa' Dirman dan Wa' Syam, Wa' Cicik dan Wa' jamil, Ma'ngah dan Bi'ngah serta para sepupuku yang telah memberi nasehat dan semangat bagi penulis.
11. My Spirit Motivation " Seprina Dwi Luzyana" Thanks For Your Spirit.
12. Teman-teman satu almamater umumnya, dan teman-teman di Fisip Unsri terutama anak-anak Sosiologi '04 terus semangat ya, buruan

ngerjain skripsi, serta para informan (terimakasih atas bantuan dan kerja samanya, tanpa kalian skripsi ini tidak akan dapat selesai.

13. Buat teman-temanku Fajrin “Unto”, Daniel “Batax”, Ale ‘Apek”, Toni “Tonce”, Hotdo, Dodis, Rinto, Alm Fikri Azhari “Able”, Dina “Item”, Erenaliza “Kupik”, Eroel, Citra “Bontet”, Erick, Yuk Rita, Bobby “Martoloyo” dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Buat semua orang yang telah memberikan pelajaran hidup yang terkadang tidak disadarinya namun sangat berarti buat pendewasaan diri dan pemikiranku.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Palembang, Juli 2009

A. KARIM FIKHI

ABSTRAK

Kurangnya partisipasi masyarakat dikhawatirkan akan menyebabkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini akan terhambat dan mengancam keberhasilan kebijakan ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Salah satu penyebab kegagalan suatu program adalah kurangnya partisipasi elemen-elemen pendukung program tersebut. Akan tetapi partisipasi masyarakat merupakan salah satu masalah yang kompleks, dimana banyak terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang tersebut mendukung atau tidak mendukung suatu program. Karena hal inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang.

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) mengindikasikan kuatnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan. Partisipasi masyarakat bersifat mobilitas dan otonom, Adapun bentuk partisipasi masyarakat kelurahan Talang Putri berupa Ide, Pikiran, Tenaga, dan materi, masyarakat berpartisipasi secara aktif baik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) adalah masalah pendanaan dan adanya beberapa warga yang kurang mendukung program ini.

Kata Kunci : *Partisipasi, Masyarakat, dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)*

3.2	Gambaran Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	43
3.2.1	Visi dan Misi (P2KP)	43
3.2.2	Tujuan Pelaksanaan Program Penanggulanagan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	44
3.2.3	Komponen Program	45
3.2.4	Rancangan Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	49
3.3	Gambaran Umum Informan	52
BAB IV	PEMBAHASAN	53
4.1	Kebijakan terkait Masalah Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri	54
4.2	Pemberdayaan Masyarakat	62
4.3	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	67
4.3.1	Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal	70
4.3.2	Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)	73
4.3.3	Refeleksi Kemiskinan	75
4.3.4	Pemetaan Swadaya	78
4.3.5	Pembentukan Badan Ksawadayaan Masyarakat	79
4.3.6	Perencanaan partisipatif menyusun Program Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program penanggulangan Kemiskinan (PJM-Renta Pronangkis)	82
4.3.7	Koordinasi rencana PJM Pronangkis dengan Rencana kelurahan	86
4.3.8	Pengajuan dan administrasi pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	87
4.3.9	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	87
4.3.10	Pelaksanaan kegiatan	89
4.4	Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kelurahan Talang putri	95
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang 2002-2007	4
Tabel 1.2	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel 1.3	Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian	41
Tabel 1.4	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Penghasilan Pendapatan Keluarga	41
Tabel 1.5	Penentuan Informan	52

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya sebagai persyaratan menyelesaikan jenjang S1 Sosiologi. Tak lupa pula salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Besar Muhamad SAW, beserta pengikutnya sampai akhir zaman.

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang diharapkan hasil penelitian ini dapat wawasan baru dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat hambatan-hambatan, baik dari diri penulis sendiri, maupun yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dukungan, motivasi serta bantuan yang telah diberikan sangatlah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zulkifli Dahlan , M.Si, DEA selaku Plt. Dekan FISIP Unsri.
2. Drs. Gatot Budiarto, MS selaku PD I FISIP Unsri, Dra. Rogaiyah, M.Si Selaku PD II FISIP Unsri, dan Dra. Retna Mahriyani, M.Si Selaku PD III FISIP Unsri.
3. Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Diana Dewi Sartika S.Sos, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi.
4. Drs. Sulaiman Mansyur LC Selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberi masukan berkaitan dengan kegiatan akademis.

5. Pembimbing I Drs. Mulyanto, MA yang telah banyak memberikan waktu luang untuk menasehati dan memberikan arahan penelitian bagi penulis
6. Pembimbing II Dra. Dyah Hapsari, ENH di dalam kesibukannya sebagai dosen dan Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Unsri telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada saya.
8. Para karyawan yang telah banyak membantu saya selama kuliah.
9. Kedua orang tua saya, papa dan mama yang telah banyak memberi masukan dan spirit serta doanya untuk kesuksesan dalam setiap kegiatan yang telah saya lakukan, adik-adiku tercinta, Puput, Dian dan Budi (Rajin-rajin kuliah ya biar cepet selesai), Nenek Djauhari terima kasih untuk doa dan nasihatnya.
10. Keluarga Besarku Wa' Ali syahbana dan Wa' Bainah, Papa Le' dan Mama Le', Wa' Dirman dan Wa' Syam, Wa' Cicik dan Wa' Jamil, Ma'ngah dan Bi'ngah serta para sepupuku yang telah memberi nasehat dan semangat bagi penulis.
11. My Spirit Motivation " Seprina Dwi Luzyana" Thanks For Your Spirit.
12. Teman-teman satu almamater umumnya, dan teman-teman di Fisip Unsri terutama anak-anak Sosiologi '04 terus semangat ya, buruan

ngerjain skripsi, serta para informan (terimakasih atas bantuan dan kerja samanya, tanpa kalian skripsi ini tidak akan dapat selesai.

13. Buat teman-temanku Fajrin "Unto", Daniel "Batax", Ale "Apek", Toni "Tonce", Hotdo, Dodis, Rinto, Alm Fikri Azhari "Able", Dina "Item", Erenaliza "Kupik", Eroel, Citra "Bontet", Erick, Yuk Rita, Bobby "Martoloyo" dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Buat semua orang yang telah memberikan pelajaran hidup yang terkadang tidak disadarinya namun sangat berarti buat pendewasaan diri dan pemikiranku.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Palembang, Juli 2009


A. KARIM FIKHI

Catatan : Lebih bagus r

ABSTRAK

Kurangnya partisipasi masyarakat dikhawatirkan akan menyebabkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini akan terhambat dan mengancam keberhasilan kebijakan ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Salah satu penyebab kegagalan suatu program adalah kurangnya partisipasi elemen-elemen pendukung program tersebut. Akan tetapi partisipasi masyarakat merupakan salah satu masalah yang kompleks, dimana banyak terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang tersebut mendukung atau tidak mendukung suatu program. Karena hal inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang.

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) mengindikasikan kuatnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan. Partisipasi masyarakat bersifat mobilitas dan otonom, Adapun bentuk partisipasi masyarakat kelurahan Talang Putri berupa Ide, Pikiran, Tenaga, dan materi, masyarakat berpartisipasi secara aktif baik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) adalah masalah pendanaan dan adanya beberapa warga yang kurang mendukung program ini.

Kata Kunci : *Partisipasi, Masyarakat, dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Sifat dan Jenis Penelitian	19
1.6.2 Definisi Konsep	20
1.6.3 Lokasi Penelitian	22
1.6.4 Informan	22
1.6.5 Unit Analisis	22
1.6.6 Data dan Sumber Data	22
1.6.6.1 Data Primer	22
1.6.6.2 Data Sekunder	23
1.6.7 Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.7.1 Observasi	24
1.6.7.2 Wawancara	24
1.6.7.3 Dokumentasi	25
1.6.8 Teknik Analisis Data	25
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	27
2.1 Pemberdayaan Masyarakat	27
2.2 Partisipasi	30
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	39
3.1 Gambaran Wilayah	39
3.1.1 Letak dan Luas Wilayah	39
3.1.2 Keadaan Demografi	39
3.1.3 Struktur Organisasi Kelurahan Talang Putri	42
3.1.4 Sarana dan Prasarana	42
3.1.4.1 Sarana dan Prasarana Transportasi	42
3.1.4.2 Sarana dan Prasarana Komunikasi	43
3.1.4.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan	43

3.2	Gambaran Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	43
3.2.1	Visi dan Misi (P2KP)	43
3.2.2	Tujuan Pelaksanaan Program Penanggulanagan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	44
3.2.3	Komponen Program	45
3.2.4	Rancangan Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	49
3.3	Gambaran Umum Informan	52
BAB IV PEMBAHASAN		53
4.1	Kebijakan terkait Masalah Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri	54
4.2	Pemberdayaan Masyarakat	62
4.3	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	67
4.3.1	Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal	70
4.3.2	Rebug Kesiapan Masyarakat (RKM)	73
4.3.3	Refeleksi Kemiskinan	75
4.3.4	Pemetaan Swadaya	78
4.3.5	Pemebentukan Badan Ksawadayaan Masyarakat	79
4.3.6	Perencanaan partisipatif menyusun Program Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program penanggulangan Kemiskinan (PJM-Renta Pronangkis)	82
4.3.7	Koordinasi rencana PJM Pronangkis dengan Rencana kelurahan	86
4.3.8	Pengajuan dan administrasi pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	87
4.3.9	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	87
4.3.10	Pelaksanaan kegiatan	89
4.4	Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kelurahan Talang putri	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang 2002-2007	4
Tabel 1.2	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel 1.3	Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian	41
Tabel 1.4	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Penghasilan Pendapatan Keluarga	41
Tabel 1.5	Penentuan Informan	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dulu. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan-kemudahan yang tersedia lainnya pada zaman modern.

Miskin adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 1987: 439).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan Nasional kemiskinan berasal dari kata miskin berarti tidak berharta, serba kekurangan (penghasilan sangat rendah).

Miskin dapat dibedakan menjadi tiga pengertian :

1. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum : Pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
2. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya (*Http://www. Goodgovernance-bapenas.com, akses tanggal 15 Maret 2009 pukul 20.00 wib*).

Menurut pengertian dalam buku pedoman P2KP 1 Tahun 2004, kemiskinan merupakan suatu persoalan struktural dan multidimensional yang mencakup :

- Dimensi Politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.
- Dimensi sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin dalam bentuk institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial.
- Dimensi lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta pemukiman.
- Dimensi ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak.
- Dimensi aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumber daya manusia (*Human Capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan dan sebagainya. (*Buku Pedoman P2KP 1 Tahun 2004*).

Sehingga secara umum masyarakat miskin merupakan suatu kondisi masyarakat yang berada pada suatu situasi kerentanan, tidak berdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasinya. Situasi ini menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya secara layak.

Kemiskinan di wilayah perkotaan ditandai dengan kondisi masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan dan

mata pencaharian yang tidak menentu (*Buku Pedoman P2KP 3 Tahun 2005*). Sebagai daerah metropolitan, kota Palembang tidak luput dari adanya fenomena kemiskinan perkotaan. Hal ini disebabkan kedudukan kota-kota dalam masyarakat suatu negara merupakan pusat penguasaan atau pendominasi-an bagi pengaturan kesejahteraan kehidupan warga negara, karena itu masyarakat desa cenderung berorientasi ke kota, baik untuk mencari pekerjaan menuntut ilmu atau tujuan lain yang dikenal dengan istilah urbanisasi. Adanya kecenderungan orientasi pada kota, menyebabkan kota cenderung untuk tumbuh terus dan semakin kompleks. Akan tetapi orientasi masyarakat dari desa untuk pindah ke kota tidak diiringi dengan pendidikan dan keahlian yang memadai, sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya angka kemiskinan di perkotaan.

Program pembangunan yang dilaksanakan selama ini, selalu memberikan perhatian terhadap usaha pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini masih merupakan masalah yang berkepanjangan.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang
2002-2007

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase (%)
2002	146,8	9,71
2003	125,2	9,75
2004	124,1	9,57
2005	125,9	9,35
2006	126,3	9,23
2007	124,4	8,98

Sumber : BPS Sum-Sel Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2002-2007.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2002-2003 jumlah penduduk miskin di Kota Palembang mengalami penurunan sebesar 21.600, yaitu dari 146.800 menjadi 125.200. Pada tahun 2003-2004 jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 1.100, yaitu dari 125.200 pada tahun 2003 menjadi 124.100 pada tahun 2004. Pada tahun 2004-2005 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1.800, yaitu dari 124.100 pada tahun 2004 menjadi 125.900 pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2005-2006 sebesar 0,12% meskipun demikian jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 400. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada tahun 2006-2007, yaitu dari 126.300 pada tahun 2006 menjadi 124.400 pada tahun 2007.

Berdasarkan data tersebut masalah kemiskinan merupakan masalah serius dan berkepanjangan dan harus segera ditanggulangi. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan faktor pendorong utama diadakannya pembangunan. Selain itu, kemiskinan merupakan beban yang amat

berat karena dapat menimbulkan kerawanan sosial yang akhirnya dapat menjadi gejala sosial dan kerawanan stabilitas politik.

Kemiskinan menjadi masalah yang berkepanjangan antara lain disebabkan oleh politik pembangunan dan sistem pemerintahan yang dilaksanakan pada masa orde baru bersifat monolistik sentralistik. Hal ini telah membawa dampak ketimpangan terhadap penerimaan hasil pembangunan. Model penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara memberikan bantuan langsung tunai keadaan ini mengakibatkan masyarakat miskin menjadi ketergantungan (malas) dan posisinya semakin lemah karena ketidakberdayaan yang membuatnya miskin, selalu menyelimuti hidupnya yang tidak dapat diantisipasi. Kondisi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah masih menggunakan top down sehingga masyarakat hanya ditempatkan sebagai sasaran atau obyek pembangunan (Yugisira, 2008:3).¹

Program pemberdayaan masyarakat miskin seharusnya melibatkan berbagai faktor dalam pemberdayaan dan menempatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan atau sebagai pelaku dalam pembangunan. Memang ironis bahwa walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia, tapi pemahaman terhadapnya dan upaya untuk mengentaskannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bahkan, dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia orang miskin “baru” semakin bertambah.

Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional (Propenas) tahun 2004-2009 dengan disusun rencana

pembangunan jangka menengah, yang mengidentifikasi permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah :

1. Masih lemahnya karakter bangsa.
2. Belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Belum berkembangnya nasionalisme, kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi.
4. Belum terjawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memakai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana.
5. Kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

Salah satu prioritas dari pembangunan nasional adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, dan peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. (Tim koordinasi P2KP,2005)

Adanya prioritas pembangunan tersebut, dalam hal ini telah banyak kebijakan yang berupa program/proyek muncul untuk menanggulangi kemiskinan. Sebagai daerah metropolitan kota Palembang tidak luput dari adanya fenomena kemiskinan perkotaan. Telah banyak program yang muncul yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di kota Palembang seperti program jaring pengaman sosial (JPS), bantuan langsung tunai, pengadaan beras murah (Raskin), program askeskin, program pemberdayaan masyarakat pemerintah daerah (P2MD), tetapi semua program tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, masih banyak penyimpangan yang terjadi serta program tersebut

hanya menjadikan masyarakat miskin sebagai objek dari program penanggulangan kemiskinan. Usaha peningkatan kapasitas masyarakat miskin kurang menjadi perhatian, masyarakat hanya dapat menerima bantuan bukan dengan pemberdayaan.

Melihat pengalaman selama ini, maka pemerintah pusat menjadikan program sebelumnya sebagai pembelajaran dan memperbaiki kegagalan yang telah terjadi. Salah satu kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat menunjang pembangunan nasional saat ini adalah penanggulangan kemiskinan dengan target tahun 2009 yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dijadikan suatu program yang mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan di perkotaan khususnya di Palembang secara menyeluruh guna mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dari kondisi masyarakat miskin menjadi berdaya (Buku Pedoman P2KP, 2005).

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun gerak kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, dll) (Buku Pedoman P2KP, 2005).

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilaksanakan secara bertahap yang terdiri dari beberapa fase : P2KP I dilaksanakan dari tahun

1999-2004 di enam provinsi, yang tersebar di wilayah Pantura Jawa, Kabupaten dan Kota Bandung, D.I Yogyakarta, Kabupaten dan Kota Malang dengan lokasi sasaran 2.621 kelurahan. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) II dilaksanakan dari tahun 2004-2008 di tiga belas provinsi yang tersebar di Pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur), Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Jawa bagian selatan dengan lokasi sasaran 2.059 kelurahan. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) III dilaksanakan dari tahun 2005-2011 di lima belas provinsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua dengan lokasi sasaran 1.726 kelurahan (Buku info P2KP, Februari 2007). Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) III sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat (kecuali beberapa jenis kegiatan yang dilarang) yang akan didanai, terutama kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin, serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan, yang meliputi :

- **Kegiatan Pemberdayaan Sosial**, berupa kegiatan penyantunan bagi warga miskin, seperti : jompo, anak yatim piatu, korban bencana, anak putus sekolah karena alasan ekonomi dan sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi**, yaitu melalui kegiatan ekonomi pelatihan, pelatihan ini dapat diadakan sesuai kebutuhan dan kesepakatan warga kelurahan. Pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial dalam upaya menunjang

penciptaan peluang usaha baru, perkembangan usaha, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

- **Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan**, berwujud pemeliharaan, perbaikan maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar lingkungan pemukiman yang dibutuhkan masyarakat kelurahan, seperti jalan dan lingkungan, ruang terbuka hijau atau taman dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat atau komponen lain yang disepakati masyarakat.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilaksanakan melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat Kelurahan sasaran. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) diharapkan cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, program penanggulangan berpotensi sebagai gerakan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan ide dasar dari program ini. Sehingga program ini menuntut kreatifitas dan analisis yang tinggi dari masyarakat untuk menentukan tindakan apa saja yang akan diambil dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu dalam program-program penanggulangan kemiskinan terdahulu, kebijakan yang diambil pemerintah menyebabkan masyarakat menjadi malas dan tidak akan menyentuh kemiskinan.

Peran serta masyarakat dalam proses kebijakan di negara berkembang hanya bersifat pasif atau reaktif saja. Masyarakat masih menganggap kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang datang dari lingkungannya dan tidak merasa

terlibat dalam menentukan atau membentuk kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan akan hanya terwujud apabila proses kebijakan tersebut melibatkan atau mengenai dirinya.

Rendahnya pendidikan masyarakat di daerah-daerah akan menyebabkan rendahnya kreatifitas masyarakat sehingga akan mengganggu tercapainya tujuan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini. Selain itu proyek-proyek pemerintah yang selalu identik dengan korupsi dan kolusi juga akan menghambat program ini. Hal ini menuntut partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya baik itu dalam pengawasan lelang, tender kegiatan, maupun penggunaan dana anggaran. Selama ini yang terjadi di masyarakat, partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah sangat kurang sekali, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Sehingga banyak program-program yang ada tidak mendapatkan hasil yang diharapkan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dikhawatirkan akan menyebabkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini akan terhambat dan mengancam keberhasilan kebijakan ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Salah satu penyebab kegagalan suatu program adalah kurangnya partisipasi elemen-elemen pendukung program tersebut. Akan tetapi partisipasi masyarakat merupakan salah satu masalah yang kompleks, dimana banyak terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang tersebut mendukung atau tidak mendukung suatu program. Karena hal inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju Palembang

1.4. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi pembangunan dan sosiologi perkotaan dalam mengkaji dan memahami berbagai dimensi yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi aparat terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai sasaran dan tujuan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah ditetapkan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) sebenarnya telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fachrizal Bachri, SE (1993), penelitian ini berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Program Perbaikan Kampung di Kotamadya Palembang*". Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa sesuai dengan rencana *Kampung Improvement Project* (KIP), secara keseluruhan tidak melibatkan peran serta masyarakat secara menyeluruh. Seharusnya perlu melibatkan masyarakat mulai

dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini diperlukan karena yang tahu betul dengan apa yang mereka perlukan dan bagian kampung mana yang memerlukannya adalah masyarakat itu sendiri, bukan masyarakat elit saja yang punya kepentingan lain dari masyarakat. Disamping itu, alasan lainnya agar masyarakat yang terlibat merasa dihargai sehingga kemudian akan menimbulkan perasaan memiliki dan bertanggung jawab pada program tersebut.

Dari pengalaman yang ada, keterlibatan masyarakat setempat dalam pembangunan merupakan suatu sumber potensial bagi pembangunan itu sendiri, karena motivasi dari dalam dan kurangnya ketergantungan dari usaha-usaha sebelumnya. Namun demikian, mekanisme partisipasi masyarakat secara efektif masih beragam dan tidak terinci secara khusus (Osteria dan Okamura 1986: 1-2). Sebenarnya ada dua hal penggerak atau yang memberikan insiatif dalam partisipasi masyarakat yang digerakkan atau dimobilisir oleh pemerintah (*Government Organizations = GOs*) dan partisipasi masyarakat yang digerakkan oleh organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (*Non Government Organizations = GOs*). Berhubung hampir semua program pembangunan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat di Indonesia dilaksanakan maka dipandang perlu untuk melihat pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan program partisipasi yang digerakkan oleh pemerintah.

Dibeberapa negara masalah partisipasi tidaklah dikenal secara resmi, bahkan ada juga negara yang pemerintahnya sama sekali mengabaikan partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan karena khawatir terhadap kelangsungan kekuasaan mereka. Oleh sebab itu terlihat dibeberapa negara bahwa

masyarakatnya cenderung tergantung sekali terhadap program pemerintahnya (Montgomery, 1988: 7).

Pada pemerintahan yang demikian, perencanaan pembangunannya dilakukan secara “cetak biru” (*blue print*). Seperti yang dikatakan David Korten (1986:11), pendekatan cetak biru sangat cocok untuk implementasi pembangunan infrastruktur yang berskala besar dimana tujuannya sangat jelas, untuk pembangunan fisik misalnya, kondisi lingkungannya stabil dan biaya dapat diperkirakan.

Proyek-proyek partisipasi dalam pembangunan hanya merupakan inisiatif dari pihak luar yang bersifat perorangan, namun sering kali orang-orang ini adalah orang-orang yang bekerja dengan pemerintah atau pegawai pemerintah sendiri yang menginginkan perubahan tersebut. Umumnya pelopor partisipasi ini terlibat dalam pendidikan dan pelatihan anggota atau staf mereka, berfungsi membantu organisasi kemasyarakatan yang baru mau tumbuh kembang dan menjadi penasehat bagaimana mencapai tujuan akhir. Kelompok yang dibentuk oleh pegawai pemerintah untuk menunjang programnya dalam pendekatan proyek partisipasi disebut “*project group*”. Pengaruh proyek akan berkembang bila berbagai aspek telah dikenal dan berbagai kewajiban telah dipenuhi. Proyek ini akan dinamakan proyek partisipasi bila partisipasi masyarakat diberbagai aspek meningkat, sedangkan pengaruh pelopor dan peranan pemerintah makin menurun.

Secara umum, konsep partisipasi merupakan suatu mode demokrasi politis yang dikenal sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal dan

berintikan nilai sosial. Jadi, partisipasi merujuk ke proses ekonomi dan politik yang lebih luas di masyarakat (Osteria dan Okamura, 1986:13).

Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah adalah pembangunan irigasi di Piliphina yang ditulis oleh Frances Konten dalam Zamor (1985: 179-186). Sejak tahun 1976 *The National Irrigation Administration (NIA) of the Philippines* mulai mencoba pendekatan partisipasi untuk membangun irigasi. Kemudian tahun 1982, pendekatan ini tumbuh berkembang menjadi program nasional yang melibatkan lebih dari 140 sistem irigasi. Dari pengalaman menggunakan pendekatan ini, NIA mendapatkan pelajaran berharga bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan dapat bertumbuh kembang bila didukung segenap aparat pemerintah yang terkait. Selanjutnya NIA membantu masyarakat yang terlibat dengan penggunaan sistem irigasi beskala kecil selama bertahun-tahun dan juga memperhatikan juga para petani lokal yang diharapkan dapat mengelola dan merawat sistem irigasi setelah konstruksi diselesaikan. Secara umum, pengalaman NIA dengan pendekatan partisipasi membawa banyak dampak positif, termasuk pada pegawai pemerintah. Perlunya melibatkan tokoh-tokoh penggerak ke dalam tim yang dibentuk pemerintah sebelum konstruksi sehingga pasangan kerja ini dapat terlibat dan bekerjasama sebelum kegiatan konstruksi dilaksanakan oleh pemerintah.

Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki dampak ekonomi dan sosial yang lebih baik dalam berbagai jalan, dalam segala aspek umum juga meningkatkan keinginan para petani untuk lebih terlibat dan diperhitungkan dalam kegiatan yang menyangkut kehidupan dan penghidupan mereka. Para insinyur di

NIA mendapat keyakinan akan keunggulan ini yang dibuktikan dari hasil kerja pembangunan pada kegiatan irigasi skala kecil dan sistem irigasi berskala besar. Dalam usaha meningkatkan proses belajar (*learning process*) secara maksimal dari proyek-proyek tersebut, penelitian dengan proses dokumentasi dilakukan atas beberapa pilot proyek. Penggunaan penelitian ini adalah untuk menyediakan pengetahuan rinci tentang tingkat kegiatan di lapangan.

Penelitian oleh Rahmad Salim (2007) yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)*. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) belum sepenuhnya akuntabel dan belum sesuai dengan prosedur P2KP. Hal ini terlihat dari pembukuan sekretariat seluruhnya dipegang oleh UPK (unit pelaksana kegiatan) bukan oleh sekretariat BKM, masyarakat tidak mengenal siapa saja anggota BKM, tidak tahunya masyarakat atas penggunaan uang dan pengalokasian uang kepada masing-masing kegiatan, belum adanya laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana kegiatan sosial yang telah dikucurkan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam penelitian oleh S.U Pranata Negara (2008) dalam penelitiannya yang berjudul "*Partisipasi masyarakat dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kecamatan Lahat*" mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kecamatan Lahat sudah cukup

baik, dari data yang ada keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) mencapai 76,37 %. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) karena rata-rata warga yang tidak hadir dalam kegiatan disebabkan kurang mengerti dengan kegiatan tersebut. Tingginya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) tidak lepas dari kesadaran masyarakat untuk membantu dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing.

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dapat berupa sumbangan pemikiran berupa ide-ide, usulan kegiatan juga pandangan dan pendapat mengenai persoalan kemiskinan dan penanggulangannya. Sumbangan tenaga berupa pengawasan terhadap penggunaan anggaran BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Sumbangan materi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Penelitian Umi Yugissira (2008) yang berjudul "*Penerapan prinsip akuntabilitas program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dalam implementasi kegiatan pemberdayaan ekonomi di kelurahan Sungai Buah kecaamatan Ilir Timur I kota Palembang*". Dalam penelitiannya ia mengatakan penerapan akuntabilitas program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) belum akuntabel dan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). Hal ini dilihat dari jumlah fasilitas peralatan untuk menunjang pelatihan tidak sebanding dengan jumlah

peserta, ketidaktahuan masyarakat tentang jumlah dana program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, masyarakat tidak mengetahui siapa pelaksana kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut, serta belum adanya laporan pertanggung jawaban kegiatan baik dari pelaksana kegiatan kepada BKM “Sungai buah mandiri” atau juga dari BKM “Sungai buah mandiri” kepada masyarakat.

Belum akuntabelnya program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di sungai buah ini antara lain disebabkan kurangnya biaya operasional untuk para pengawas lapangan. BKM (badan keswadayaan masyarakat) tidak mengetahui perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah mereka mengikuti kegiatan ekonomi pelatihan, yaitu perubahan pada tingkat kemandirian masyarakat, sehingga berdampak terhambatnya penciptaan peluang usaha baru bagi masyarakat.

Eddy Prayitno, S.Si Mahasiswa Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Sriwijaya (UNSRI) (2007) dalam tulisannya *Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)* mengungkapkan, manfaat yang diperoleh dengan dibentuknya BKM (badan keswadayaan masyarakat) adalah, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan peri kehidupan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan memprakarsai kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan dan keuangan) mereka sendiri secara berkelanjutan, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan kegiatan dan program pembangunan

mereka sendiri, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan.

Berdasarkan penelitian di atas yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang saya lakukan sekarang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian yang saya lakukan menggambarkan dengan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) khususnya di Kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju kota Palembang serta mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini akan mengungkapkan suatu fenomena sosial sesuai dengan kerja yang teratur melalui pemikiran yang matang dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian kualitatif secara umum bersifat emik, dimana metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara yang menghasilkan temuan yang bervariasi, yang akan ditampilkan secara naratif.

Penelitian adalah yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju Palembang.

1.6.2 Definisi Konsep

1. **Partisipasi** : Keterlibatan individu atau keluarga dalam suatu kelompok berupa daya sebagai sumbangan atau kontribusinya terhadap kelompok itu.
2. **Partisipasi masyarakat**: Usaha menggali, menggerakkan dan mengerahkan daya dalam bentuk apapun dari masyarakat dalam rangka mensukseskan tujuan tertentu.
3. **Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)**: program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun gerak kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal (Buku Pedoman P2KP, 2005).

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi ini karena menurut data BPS Sumatera selatan tahun 2007 kelurahan ini merupakan kelurahan yang memiliki jumlah KK pra-sejahtera yang paling tinggi dibandingkan kelurahan lainnya di kecamatan Plaju, sedangkan kecamatan Plaju merupakan kecamatan yang paling tinggi jumlah KK pra-sejahteranya di kota

Palembang (Data terlampir). Dimana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan program yang memerlukan perhatian dari seluruh komponen dalam masyarakat khususnya masyarakat miskin, menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan. Selain itu di kelurahan ini Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sudah berjalan, sekarang sudah masuk pada tahap ke tiga.

1.6.4 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Lexy. J. Moleong, 1998: 90). Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu teknik yang bertujuan mengambil informan dari orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti dengan persyaratan yang dibuat sebagai kriteria.

Adapun kriteria-kriteria yang dipakai untuk menjanging informan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat setempat yang berdomisili di kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju kota Palembang (Relawan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok swadaya Masyarakat (KSM), Unit Pelaksana (UP).
2. Mengenal secara mendalam mengenai proyek P2KP di kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju kota Palembang.



3. Orang-orang yang terlibat langsung sebagai pengelola P2KP dan penerima bantuan langsung mandiri (BLM) P2KP.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kelurahan Talang Putri kecamatan Plaju kota Palembang. Yaitu dari masyarakat dan pengelola.

1.6.6 Data dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari ke 16 informan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu bisa dilakukan dengan pengamatan (observasi).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar data primer, sumber data sekunder diperoleh dari :

- a. Studi Pustaka, digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung serta berhubungan dengan permasalahan-permasalahan penelitian. Data dan informasi yang dimaksud

diperoleh melalui buku-buku seperti buku metode penelitian, buku mengenai Program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan laporan penelitian yang pernah dilakukan serta relevan dengan permasalahan penelitian.

- b. Internet, data dan informasi yang dimaksud diperoleh melalui situs-situs di internet yang relevan terhadap masalah penelitian.
- c. Data monografi kelurahan Talang Putri.

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (1993: 223) mengungkapkan bahwa metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Penulis mengambil data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu pengamatan secara langsung tentang obyek atau daerah penelitian. Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1.6.7.1 Observasi

Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan atau penginderaan secara langsung terhadap objek penelitian, mendengar, melihat serta memperhatikan secara langsung sehingga diperoleh gambaran nyata dan jelas objek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi dan situasi warga Kelurahan Talang Putri, Untuk mengetahui apakah sasaran yang akan diteliti cukup tepat untuk menjawab kebutuhan peneliti. Peneliti mengamati secara langsung

1993: 131). Metode ini digunakan untuk mencari atau melengkapi data dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti data jumlah penduduk, data pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan data mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang.

1.6.8 Tehnik Anallisis Data

Tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Habermas (1992) terdapat tiga tahapan analisis data (Bungin, 2003: 229) yaitu :

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyerehanaan transformai data kasar yang muncul dari data lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi yang merupakan rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga keaslian datanya sehingga tidak mengubah makna sebenarnya.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, artinya data tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan akan peneliti sajikan dalam bentuk cerita misalnya bagaimana bentuk

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang seperti mengikuti pelatihan untuk relawan yang dilakukan oleh fasilitator Kelurahan. Selain itu juga mengamati lingkungan Kelurahan Talang Putri seperti melihat sarana dan prasarana.

1.6.7.2 Wawancara

Metode wawancara adalah dialog (tanya jawab) yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara (Arikunto, 1993: 126). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan *indepth interview*/wawancara mendalam dan langsung terhadap informan dimana peneliti juga membawa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yang berhubungan dengan penelitian ini bertujuan memudahkan peneliti dalam menggali informasi, hasil wawancara ini peneliti catat dalam buku yang telah peneliti siapkan. Wawancara dilakukan pada sumber-sumber yang dianggap paling mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang.

1.6.7.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu cara atau metode dalam mengumpulkan data dari dokumen barang-barang tertulis (Arikunto,

partisipasi masyarakat dalam tahapan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Kemudian data tersebut akan diringkas dan disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti oleh semua pihak.

3. Tahap Kesimpulan (Verifikasi)

Pada tahap ini peneliti memberikan kesimpulan data yang telah diproses pada tahap 1 dan 2 diatas secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris. 1992. *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI
- Arikunto, Juharsini, 1997, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta, Rineka Cipta
- Bachri, Fachrizal SE. 1993. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Perbaikan Kampung di Kotamadya Palembang*. Palembang : Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2007. *Kecamatan Plaju Dalam Angka 2007*
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Hetifah, SJ, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta
- Pranata, S.U Negara .2008. *Partisipasi masyarakat dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kecamatan Lahat*. Indralaya : FISIP UNSRI
- Prayitno, Eddy. 2007. *Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) MAP Universitas Sriwijaya UNSRI*
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Sukardi, Laksamana. 2008. *Memberantas Kemiskinan Melawan Gombalisasi Global*. Jakarta : PDP
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Sajogyo, Pudjiwati dan Sajogyo. 2002. *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta

Salim,Rahmad. 2007. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)*. Indralaya : FISIP UNSRI

Sastrasapoetra. 1990. *Partisipasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan*. Jakarta : Alumni

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta

Umi Yugissira. 2008. *Penerapan prinsip akuntabilitas program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dalam implementasi kegiatan pemberdayaan ekonomi di kelurahan Sungai Buah kecaamatan Ilir Timur I kota Palembang*. Indralaya : FISIP UNSRI

Buku info P2KP, Februari 2007

Buku Pedoman Umum P2KP 1 Tahun 2004. Departemen Pekerjaan Umum

Buku Pedoman Umum P2KP-3 2005. Departemen Pekerjaan Umum

Buku Pedoman Umum Program Nasional Pe,berdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 2007

Http://:www. Goodgovernance-bapenas.com, akses tanggal 15 Maret 2009 pukul 20.00 wib